

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		September	September Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut	Laporan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten	
	Persentase permohonan paten dalam negeri yang tidak bisa digrant yang tinggi, sehingga memerlukan upaya untuk pendampingan penyusunan dokumen permohonan paten yang baik dan benar kepada para calon pemohon paten (asistensi Drafting Paten)	Maret - April	Maret - April Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta	Laporan Koordinasi Laporan Calon Peserta	Kantor Wilayah Kemenkumham
Mei - Oktober		Mei - Oktober Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting		
November		November Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut	Laporan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting		
	Tren permohonan desain industri beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi dan penurunan di dalam negeri, serta mulai munculnya beberapa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan mekanisme perlindungan desain industri	Januari	B01 : - koordinasi dengan Stakeholder terkait - Membentuk Tim Inventarisasi Data Potensi Desain Industri SK Tim	B01 : - Laporan koordinasi - SK Tim	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Februari		B02 : Koordinasi DJKI dan Kanwil Kumham secara virtual, dimana DJKI akan menyampaikan petunjuk pelaksanaan inventarisasi data potensi desain industri Laporan pertemuan virtual yang dilampiri dengan dokumentasi	B02 : Laporan pertemuan virtual yang dilampiri dengan dokumentasi		
Maret		B03 : Melaksanakan rapat persiapan rencana aksi inventarisasi data potensi desain industri Laporan yang dilampiri notula rapat dan dokumentasi	B03 : Laporan yang dilampiri notula rapat dan dokumentasi		

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		April-Mei	B04 – B06 : Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah masing-masing Laporan kordinasi yang dilampiri dokumentasi	B04 – B05 : Laporan kordinasi yang dilampiri dokumentasi	
		Juni-Juli	B06 – B07 . Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor industri kreatif Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	B06 – B07 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	
		Agustus-September	B08 – B09 . Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor pendidikan Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	B08 – B09 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	
		Oktober	B10 : Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor asosiasi pengusaha atau industri Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	B10 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	
		November	B11 : Menyampaikan hasil inventarisasi potensi desain industri ke DJKI Laporan Potensi Desain Industri di wilayah	Laporan Potensi Desain Industri di wilayah	
2	Rendahnya Permohonan Paten Dalam Negeri	Januari s/d Desember	- Melaksanakan Program Patent One Stop Service Di Daerah - Malaksanakan Program Patent Examiners Go To Campus Di Daerah 33 Provinsi	Target Peningkatan Jumlah Permohonan Paten Dalam Negeri 4.600 Permohonan Terpenuhi	Direktorat Paten Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	Proses pembuatan kebijakan di Kemenkumham belum didasarkan pada bukti dan analisis yang memadai	Januari-Maret	Sosialisasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan kepada UKE I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Sosialisasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
		Juni	Inventarisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai kriteria Indeks Kualitas Kebijakan	Laporan Hasil Inventaris Kemenkumham sesuai kriteria Indeks Kualitas Kebijakan	
		September	Pendampingan pemenuhan data dukung Indeks Kualitas Kebijakan kepada UKE I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pendampingan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		September-Desember	1. Penilaian mandiri pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Penyusunan laporan hasil penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Rekap hasil penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Laporan penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
2	Kualitas Penataan regulasi yang belum merata dibuktikan dengan tingkat partisipasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penilaian IRH yang belum optimal	Januari-Maret	1. Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah 2. Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	1. Laporan Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum 2. Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
		April - Juni	Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Juli - November	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring pengunggahan data dukung dan validasi penilaian mandiri oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum 2. Validasi dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Tim Penilai Nasional 3. Penyusunan Berita Acara Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum 4. Pleno pembahasan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum 5. Penetapan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Penyampaian Hasil Penetapan Penilaian IRH kepada Menteri PAN RB 7. Penyampaian hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum secara Elektronik kepada pimpinan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Monitoring Indeks Reformasi Hukum 2. Laporan hasil validasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum 3. Dokumen Berita Acara Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum 4. Laporan Pleno pembahasan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum 5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum 6. Surat Penyampaian Hasil Penetapan Penilaian IRH kepada Menteri PAN RB 7. Surat penyampaian hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah secara elektronik 	
		Desember	Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum	Laporan Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum	
3	Kualitas penataan regulasi yang belum merata dibuktikan dengan tingkat partisipasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penilaian IRH belum optimal	Januari - Februari	Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum kepada Pemerintah Daerah	Laporan Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
		Maret	Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah	
		April- Agustus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring pengunggahan data dukung dan verifikasi penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum 2. Verifikasi faktual dan validasi data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Monitoring pengunggahan data dukung dan verifikasi penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah 2. Laporan Hasil verifikasi faktual dan 	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			dukung hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah	validasi data dukung hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah	
		November-Desember	Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	Laporan Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-01.OT.01.01 TAHUN 2024

Tanggal : 11 Januari 2024

**RENCANA AKSI BIDANG PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024**

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	
Ditjen PHH					
1	Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan	Januari	1) - Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan. 2) Pembentukan Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2024 3) Penyusunan Surat Edaran terkait mekanisme pemasaran produk pada lapas produktif melalui e-katalog	1) -Laporan Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan; 2) SK Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2024 3) Surat Edaran terkait mekanisme pemasaran produk pada lapas produktif melalui e-katalog	1) Direktorat pembimbingan Masyarakat dan Upaya Restorative Pemasyarakatan; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak

		Februari	<p>1) -Penyusunan Surat Edaran terkait Penetapan wilayah pilloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan;</p> <p>- Penyusunan SK TIM terkait penyusunan SOP Litmas Online</p> <p>- Diklat PK dan APK Bapas</p>	<p>2) -Surat Edaran terkait Penetapan wilayah pilloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan;</p> <p>- SK TIM Penyusunan SOP Litmas Online;</p> <p>- Laporan pelaksanaan Diklat PK dan APK.</p>	<p>1) Direktorat pembimbingan Masyarakat dan Upaya Restorative Masyarakat;</p> <p>2) Sekretariat Direktorat Jenderal Masyarakat.</p>
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Sosialisasi Surat Edaran terkait mekanisme pemasaran produk pada lapas produktif melalui e-katalog	3) Laporan Sosialisasi Surat Edaran terkait mekanisme pemasaran produk pada lapas produktif melalui e-katalog	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak
		Maret	<p>1) -Sosialisasi Surat Edaran terkait Penetapan wilayah pilloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan;</p> <p>- Menyusun Kajian terkait urgensi pelaksanaan litmas online di Indonesia</p>	<p>1) - laporan Sosialisasi Surat Edaran terkait Penetapan wilayah pilloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan</p> <p>- Hasil kajian urgensi pelaksanaan litmas online di Indonesia.</p> <p>-Diklat PK dan APK Bapas</p>	<p>1) Direktorat pembimbingan Masyarakat dan Upaya Restorative Masyarakat;</p> <p>2) Sekretariat Direktorat Jenderal Masyarakat.</p>

			-Diklat PK dan APK Bapas		
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog;	Direktorat Pembinaan Narekondana dan Anak
	April	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan, -Menyusun Kajian terkait urgensi pelaksanaan litmas online di Indonesia: -Diklat PK dan APK	1)- Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Hasil kajian urgensi pelaksanaan litmas online di Indonesia: -Laporan Diklat PK dan APK	1) Direktorat pembimbingan Masyarakat dan Upaya Restorative Masyarakatan; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan.	
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama

			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog;	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak
	Mei	1)- Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Masyarakatan - Sosialisasi hasil kajian dan urgensi pelaksanaan Litmas online serta pelaksanaan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait.	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Masyarakatan; - Laporan Sosialisasi hasil kajian dan urgensi pelaksanaan Litmas online serta pelaksanaan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait	1) Direktorat pembimbingan Masyarakat dan Upaya Restorative Masyarakatan; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Masyarakatan.	
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama	
		3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog;	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak	
	Junl	1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi PK dan APK pada Lepas dan Rutan wilayah piloting;	1) -Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi PK dan APK pada Lepas dan Rutan wilayah piloting;;	1) Direktorat pembimbingan Masyarakat dan Upaya Restorative Masyarakatan;	

			-Monitoring dan Evaluasi hasil sosialisasi kajian terkait litmas online dengan stakeholder terkait.	-Laporan Monitoring dan Evaluasi hasil sosialisasi kajian terkait litmas online dengan stakeholder terkait	2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaryakatan.
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog;	3) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak
	Juli		1) - Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasaryakatan; -Penyusunan SOP Litmas Online	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasaryakatan; -Laporan Penyusunan SOP Litmas Online	1) Direktorat pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Restorative Pemasaryakatan; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaryakatan.
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog;	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak

		Agustus	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Finalisasi Penyusunan SOP Litmas Online sekaligus pengesahan SOP.	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Laporan Finalisasi Penyusunan SOP Litmas Online sekaligus pengesahan SOP.	1) Direktorat pembimbingan Masyarakat dan Upaya Restorative Masyarakat; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak
		September	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan. - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	1) Direktorat pembimbingan Masyarakat dan Upaya Restorative Masyarakat; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak

			dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	
	Oktober	1) Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan: - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) -Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan: - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	1) -Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan: - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	1) Direktorat pembimbingan Masyarakat dan Upaya Restorative Masyarakat; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
		3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak
	November	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) -Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan, - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	1) -Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan, - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	1) Direktorat pembimbingan Masyarakat dan Upaya Restorative Masyarakat; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama

			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog;	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak
	Desember	1) -Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan, -Monitoring dan evaluasi SOP Litmas Online	1) -Laporan Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan, -Laporan Monitoring dan evaluasi SOP Litmas Online	1) Direktorat pembimbingan Masyarakat dan Upaya Restorative Pemasyarakatan; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.	
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama	
		3) -Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi; -Rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan program	3) -Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi; - Rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan program	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak	

2	Belum tersusunnya peraluran turunan dari Undang Undang Nomor 22 tahun 2022	Januari	<p>1. RPP: Rapat Panitia Antar Kementerian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Fungsi Masyarakat;</p> <p>2. Rpermen: Pembentukan SK Tim Percepatan Penyusunan Rancangan Permenkumham Aturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat.</p>	<p>1. RPP: LaporanRapat Panitia Antar Kementerian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Fungsi Masyarakat;</p> <p>2. Rpermen: SK Tim Percepatan Penyusunan Rancangan Permenkumham Aturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat</p>	Sekretariat Direktorat Jenderal Masyarakat
---	--	---------	---	---	--

		<p>Februari- Maret</p>	<p>1. RPP: Rapat Panitia Antar Kementerian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan;</p> <p>2. Rpermen: Konsep/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak</p>	<p>1. RPP: Laporan Rapat Panitia Antar Kementerian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan;</p> <p>2. Rpermen: Draft RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak</p>	
--	--	----------------------------	--	--	--

		April-Juni	<p>1. RPP: Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan;</p> <p>2. Rpermen: Konsep RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Keterliban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak.</p>	<p>1. RPP: Laporan Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan;</p> <p>2. Rpermen: Draft RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak.</p>	
--	--	------------	---	--	--

		<p>Juli- September</p>	<p>1. RPP: Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Masyarakat; 2. Rpermen: Penyelarasan RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Masyarakat/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak</p>	<p>1. RPP: Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Masyarakat 2. Rpermen: Laporan Penyelarasan RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Masyarakat/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak</p>	
--	--	----------------------------	--	---	--

		Oktober	<p>1. RPP: Pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasarakatan</p> <p>2. Rpermen: Penetapan RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Keterliban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak</p>	<p>PP: Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasarakatan</p> <p>2. Rpermen: Draft RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Keterliban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak</p>	
--	--	---------	---	--	--

		<p>November - Desember</p> <p>1. RPP: Pengundangan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan</p> <p>2. Rpermen: Penetapan RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak</p>	<p>1. RPP: Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan</p> <p>2. Rpermen: Draft RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak</p>	
--	--	---	---	--

1	Pemenuhan Hak Integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah	Januari	1) - Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lepas dan Rutan.	1) -Laporan Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lepas dan Rutan.	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pembentukan Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2024	2) SK Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2024	
			3) Pemetaan terhadap Lepas yang berpotensi menjadi lepas produktif	3) Laporan Pemetaan terhadap Lepas yang berpotensi menjadi lepas produktif.	
		Februari	1) - Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lepas dan Rutan.	1) -Laporan Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lepas dan Rutan.	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Penetapan terhadap Lepas yang berpotensi menjadi lepas produktif (piloting)	3) Laporan Penetapan terhadap Lepas yang berpotensi menjadi lepas produktif (piloting)	
		Maret	1) -Sosialisasi terkait Penetapan wilayah piloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lepas/ Rutan	1) laporan Sosialisasi terkait Penetapan wilayah piloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lepas/ Rutan (piloting)	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lepas	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lepas produktif melalui e katalog di UPT Piloting;	

			produktif melalui e katalog di UPT Piloting		
	April	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan:	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan:		DIVISI PEMASYARAKATAN
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan		
		3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;		
	Mei	1)- Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK yang mel di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Sosialisasi hasil kajian dan urgensi pelaksanaan Litmas online serta pelaksanaan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait.	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Laporan Sosialisasi hasil kajian dan urgensi pelaksanaan Litmas online serta pelaksanaan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait		DIVISI PEMASYARAKATAN

			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog di wilayah	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog di wilayah ;	
	Juni	1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi PK dan APK pada Lapas dan Rutan wilayah piloting,	1) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi PK dan APK pada Lapas dan Rutan wilayah piloting		DIVISI PEMASYARAKATAN
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan		
		3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;	3) Laporan Monitoring dan Evaluasi		
	Juli	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan.		DIVISI PEMASYARAKATAN
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan		
		3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan		

			produktif melalui e katalog di wilayah,	pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;	
	Agustus	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	DIVISI PEMASYARAKATAN
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
		3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah,	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah,	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah,	
	September	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	DIVISI PEMASYARAKATAN
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
		3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan	

			produktif melalui e katalog di wilayah;	pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog di wilayah .	
	Oktober	1) Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online		DIVISI PEMASYARAKATAN
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan		
		3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis produktif melalui e katalog di wilayah;		
	November	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) -Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lepas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasarakatan; - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online		DIVISI PEMASYARAKATAN
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan		
		3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapis	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan		

			produktif melalui e katalog di wilayah;	pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah	
	Desember	1) Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi PK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) Laporan Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan.		DIVISI PEMASYARAKATAN
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan		
		3) -Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;	3) -Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;		



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN IV

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-01.OT.01.01 TAHUN 2024

Tanggal : 11 Januari 2024

**RENCANA AKSI BIDANG IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024**

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI	HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	Penerbitan Paspor Biasa Elektronik belum terlaksana pada 24 Kantor Imigrasi	Januari - Maret 1. Rapat Persiapan Penambahan 24 (dua puluh empat) Kantor Imigrasi Penerbit Paspor Biasa Elektronik 2. Penetapan 126 (seratus dua puluh enam) kantor Imigrasi penerbit Paspor Biasa Elektronik 3. Rapat Pembahasan Pengaturan Distribusi Blangko dan Kuota Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada Kantor Imigrasi 4. Penyusunan Surat hal Pengaturan Kuota Paspor Biasa Elektronik pada Kantor Imigrasi 5. Sosialisasi Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik	1. Notula Rapat Persiapan Penambahan 24 (dua puluh empat) Kantor Imigrasi Penerbit Paspor Biasa Elektronik 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penetapan 126 (seratus dua puluh enam) kantor Imigrasi penerbit Paspor Biasa Elektronik 3. Notula Rapat Pembahasan Pengaturan Distribusi Blangko dan Kuota Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada Kantor Imigrasi 4. Surat hal Pengaturan Kuota Paspor Biasa Elektronik pada Kantor Imigrasi 5. Laporan Kegiatan Sosialisasi	Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
				Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik	
		April - Juni	Pemantauan Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada 16 (enam belas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada 16 (enam belas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Juli - September	Pemantauan Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Oktober - Desember	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik Secara Bertahap di Seluruh Kantor Imigrasi	Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
				Secara Bertahap di Seluruh Kantor Imigrasi	
2	Perlu Ditingkatkan Spesifikasi Teknis Blangko Dokumen Perjalanan RI berstandar ICAO dan perlu pembaharuan desain	Januari- Maret	1. Pembentukan SK Tim 2. Penyusunan Draft Awal Rancangan Permenkumham Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM 8 Tahun 2014	1. SK Tim 2. Draft Awal Rancangan Permenkumham Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM 8 Tahun 2014	Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian
Januari- Maret	Pembahasan dan Penetapan Rancangan Permenkumham Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM 8 Tahun 2014	Permenkumham Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM 8 Tahun 2014			
April - Juni	1. Pembahasan dan Penetapan Rancangan Surat Keputusan Menteri tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Khusus Blangko Paspor Biasa dan SPLP 2. Pembahasan dan Penetapan Rancangan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Khusus Blangko Paspor Biasa dan SPLP	1. Surat Keputusan Menteri tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Khusus Blangko Paspor Biasa dan SPLP 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Khusus Blangko Paspor Biasa dan SPLP			
Juli - September	Sosialisasi Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paspor Biasa dan SPLP	Laporan Kegiatan Sosialisasi Perubahan Kedua atas Peraturan			

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
				Menteri Hukum dan HAM tentang Paspur Biasa dan SPLP	
3	Belum Adanya Penyesuaian Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) terkait Digitalisasi Permohonan Visa	Januari - Maret	<ol style="list-style-type: none"> 1. penerbitan SK Tim penyusunan SOPAP pengajuan permohonan visa secara digital; 2. Penyusunan SOPAP pengajuan visa secara digital; 3. pengumpulan bahan studi komparasi mengenai pemberian visa bagi tenaga kerja asing. <p>Penerbitan SOPAP pengajuan permohonan visa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim 2. SOPAP pengajuan visa secara digital 3. Laporan observasi mengenai komparasi pemberian visa bagi tenaga kerja asing di berbagai negara 	Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian
April - Juni	<ol style="list-style-type: none"> 1. implementasi SOPAP pengajuan visa secara digital 2. penyusunan buku panduan pengajuan permohonan visa 3. penyusunan studi komparasi mengenai pemberian visa bagi tenaga kerja asing <p>penerbitan buku panduan pengajuan visa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan implementasi SOPAP pengajuan visa secara digital 2. Buku panduan pengajuan visa secara digital 3. Konsep laporan studi komparasi pemberian visa bagi tenaga kerja asing di berbagai negara 			